



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-16/PB/PB.6/2021 30 Juni 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2021

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur
Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
sesuai daftar terlampir

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Satuan Kerja (Satker)
dengan KPPN dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, maupun
UAPA Tahun 2021 menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK yang dapat diakses melalui alamat
website www.e-rekon-lk.kemenkeu.go.id.
2. Aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi adalah:
 - a. Aplikasi SAKTI bagi K/L yang telah mengimplementasikan semua modul SAKTI;
 - b. Bagi K/L yang belum mengimplementasikan semua modul SAKTI, menggunakan Aplikasi
SAIBA versi 21.0.0 referensi versi 21.0.0 sebagaimana telah dirilis dalam surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor S-15/PB/PB.6/2021 tanggal 29 Juni 2021 hal Rilis Aplikasi
SAIBA Versi 21.0.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2021 mulai dilaksanakan untuk periode rekonsiliasi bulan Mei
2021. Data rekonsiliasi bulan Mei 2021 merupakan data kumulatif dari Januari s.d. Mei 2021.
Khusus pelaksanaan rekonsiliasi bulan Mei 2021 mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Data rekonsiliasi bulan Mei 2021 meliputi:
 - 1) Bagi K/L yang telah mengimplementasikan semua modul SAKTI, data rekonsiliasi terdiri
dari data keuangan dan data BMN;
 - 2) Bagi K/L yang belum mengimplementasikan semua modul SAKTI, data rekonsiliasi
hanya untuk data keuangan (tanpa data BMN).
 - b. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi:

Periode Rekonsiliasi	<i>Open Period</i>	Periode Penyelesaian Rekonsiliasi	<i>Closed period</i>
(1)	(2)	(3)	(6)
Mei 2021	30 Juni s.d. 9 Juli 2021	30 Juni s.d. 9 Juli 2021	10 Juli 2021

- c. Apabila data telah sesuai dengan kebijakan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2017
tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara

Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, KPPN melakukan “*approval*” dan selanjutnya kedua belah pihak (UAKPA dan KPPN) melakukan proses tanda tangan secara elektronik;

- d. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam BAR sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017;
 - e. Pelaksanaan rekonsiliasi bulan Mei 2021, dikecualikan dari aturan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017;
4. Ketentuan dan jadwal rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Semester I Tahun 2021 diatur lebih lanjut.
 5. Kementerian Negara/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA/B-E1, UAPPA/B-W, dan UAKPA/B.
 6. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi e-Rekon&LK dapat dilakukan melalui Layanan *Helpdesk* HAI-DJPb pada *website* hai.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-16/PB/PB.6/2021

Tanggal : 30 Juni 2021

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN**

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

No.	Kementerian Negara/Lembaga
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban